

Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. File Scan Surat Keabsahan Dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi;</li> <li>2. File Scan Surat Pengantar Gubernur;</li> <li>3. File Scan Ranperda tentang APBD;</li> <li>4. File Scan Ranpergub tentang Penjabaran APBD;</li> <li>5. File Scan Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD;</li> <li>6. File Scan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD;</li> <li>7. File Scan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD;</li> <li>8. File Scan Rencana Kerja Prioritas Daerah;</li> <li>9. File Scan Risalah Sidang;</li> <li>10. File Scan Nota Keuangan; dan</li> <li>11. File Scan Pengantar Nota Keuangan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA <a href="http://ula.kemendagri.go.id">ula.kemendagri.go.id</a>; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan

		Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. <a href="http://kemendagri.lapor.go.id">http://kemendagri.lapor.go.id</a> 2. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a> ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

